



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

JL. HM. Sarbini No.99 Kabupaten Kebumen, Kodepos
54316, Telepon: (0287) 381128 Fax: (0287) 382831
Kebumen

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Wr Wb

Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Setiap unsur Pemerintahan sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024 Sebagai media akuntabilitas dan informasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan Kinerja beserta Permasalahan dan solusi dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Peraturan IKU Instansi. Selain itu, dokumen LKjIP ini sebagai bentuk komitmen DPUPR Kabupaten Kebumen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan untuk menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang

Kebumen, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama	24
1.4 Landasan Hukum	25
BAB II	30
PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis	30
2.1 Perjanjian Kinerja	46
BAB III	48
AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Capaian Kinerja DPUPR Ta.2024	49
3.3 Realisasi Anggaran Belanja	69
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	78
B. Permasalahan dan Kendala	79
C. Rekomendasi	80

Daftar Tabel

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2024	12
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi golongan Tahun 2024	13
3. Tabel 1.3 Jumlah Pejabat struktural Tahun 2024	13
4. Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Sampai Dengan Tahun 2024	14
5. Tabel 1.5 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	18
6. Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD kabupaten Kebumen	34
7. Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	34
8. Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ka. Kebumen Tahun 2021-2026.....	35
9. Tabel 2.4 Indikator Kinerja DPUPR	38
10. Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas	39
11. Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas.....	46
12. Tabel 2.7 Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas.....	47
13. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
14. Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Ta. 2024.....	50
15. Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kebumen Tahun 2024	52
16. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kebumen Tahun 2022 s/d 2024	52
17. Tabel 3.5 Capaian Kemajuan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kebumen Tahun 2022 s/d 2024.....	56
18. Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kebumen Tahun 2023 s/d 2024	57
19. Tabel 3.7 Ketersediaan Panjang Jalan Tahun 2022 – 2024	58
20. Tabel 3.8 Capaian Jalan dalam kondisi Mantap Tahun 2024	60
21. Tabel 3.9 Ketersediaan Jalan sesuai kondisi dari Tahun 2021 – 2026.....	60
22. Tabel 3.10 Capaian Pelayanan Air Bersih sesuai SPM Tahun 2024	62
23. Tabel 3.11 Realisasi Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Ta2024	63
24. Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Cakupan Air Bersih.....	65
25. Tabel 3.13 Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	66
26. Tabel 3.14 Capaian Realisasi keuangan Tahun 2024	70

Daftar Gambar

1. Gambar 1.1 Struktur Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024	4
2. Gambar 3.1 Prosentase Tingkat pelayanan Infrastruktur Wilayah.....	57
3. Gambar 3.2 Jalan Kondisi Mantap.....	61
4. Gambar 3.3 Capaian Air bersih.....	65
5. Gambar 3.4 Capaian Irigasi Kondisi Baik.....	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Dinas Teknis yang menangani urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, diantaranya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Air Bersih, Drainase, Gedung, Selain itu juga memberikan Pelayanan Persewaan alat berat, Pelayanan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Urusan Pertanahan yang berkaitan dengan inventarisasi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintah yang baik (Good Governance).

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Penyusunan LKjIP, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara lebih baik dan benar, berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kebumen Tahun 2021-

2026, Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ini dimulai dari penjabaran rencana Strategi (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi), Sampai dengan pengukuran keberhasilan rencana tersebut dengan penilaian atas aktivitas Program dan Evaluasi Kinerja.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Bina Marga;
 - b. Subkoordinator Jalan; dan
 - c. Subkoordinator Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - b. Subkoordinator Bangunan Gedung; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Air Bersih.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Subkoordinator Irigasi; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Lainnya.
- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Subkoordinator Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 - a. UPTD PBPJJ Wilayah Gombong
 - b. UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar
 - c. UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
 - d. UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun
 - e. UPT PJI SDA Sempor
 - f. UPT PJI SDA Kedungsamak
 - g. UPT PJI SDA Kaligending
 - h. UPT PJI SDA Bedegolan

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Uraian Tugas

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT (Unit Pelaksana Teknis Dinas); dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

II. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kersipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
- b) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- c) Subkoordinator Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan di bidang perencanaan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengoordinasian dan penyusunan, pengendalian dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas

III. Bidang Bina Marga

Bina Marga Mempunyai tugas Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan.
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Bina Marga Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga. Meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, serta menyiapkan bahan peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Subkoordinator Jalan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jalan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan.
- c) Subkoordinator Jembatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jembatan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.

IV. Bidang Cipta Karya

Cipta karya Mempunyai tugas Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi pengelolaan air bersih bangunan gedung, dan pembinaan konstruksi, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan cipta karya;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air bersih;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya serta pelaksanaan administrasi teknik dan pembinaan konstruksi
- b) Subkoordinator Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan gedung. meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggaran di bidang bangunan gedung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.
- c) Subkoordinator Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang air bersih meliputi perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih,

perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

V. Bidang Sumber Daya Air

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai, pantai, drainase, dan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai, dan drainase;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan sumber daya air. Meliputi menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya.
- b) Subkoordinator Irigasi yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi. Meliputi menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi serta pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- c) Subkoordinator Bangunan Air Lainnya yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan air lainnya. meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai,

pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

VI. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan. dengan fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanahan; dan
- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahi,

- a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan tata ruang. Meliputi menyiapkan bahan perumusan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang meliputi menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, bahan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- c. Subkoordinator Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanahan meliputi menyiapkan perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan, pelaksanaan administrasi pertanahan, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penyelesaian sengketa tanah

garapan dalam Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah,

- VII. Kepala Unit Pelaksana Teknis bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional_Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2. Tata Kerja

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sebagai berikut :

- a. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- b. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja..
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

3. Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pendukung Tugas Kepala Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terbagi atas 4 (empat) Bidang, 1 (Satu) Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen sampai dengan Januari 2024 berjumlah sebanyak 235 orang, terdiri dari 176 ASN dan 59 P2K orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 57,59% dari total pegawai sebagaimana tabel 1:

Tabel.1.1

Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD/MI	8	4,55 %
2	SLTP/MTS	8	4,55 %
3	SLTA/MA	102	57,95 %
4	Diploma I, II dan III	12	6,82 %
5	Diploma IV/ Strata I	38	21,59 %
6	Strata II	8	4,55%
Total		176	100%

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2024

b. Menurut Golongan/Ruang :

Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Kebumen menurut pangkat/golongan paling banyak adalah pegawai dengan golongan II atau sebesar 52,27 % dari total pegawai sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen Menurut Tingkat Golongan

No	Kualifikasi Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	3	1,70 %
2	Golongan II	92	52,27 %
3	Golongan III	68	38,64 %
4	Golongan IV	6	3,41 %
5	P3K	7	3,98 %
Total		176	100%

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2024

c. Menurut Jenjang Jabatan

Gambaran Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kebumen Menurut Golongan/Pangkat

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II b (kadinan)	1	4,76%
2	Eselon III a (sekdin)	1	4,76%
3	Eselon III b (kabid)	4	19,05%
4	Eselon IV a (kasubag/ka.UPT)	11	52,38%
5	Eselon IV b (Ka.Tu di UPT)	4	19,05%
Total		21	100%

4. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sampai dengan Tahun 2024 perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Berikut ini sarana dan prasarana DPUPR Tahun Anggaran.2024

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Eksisting s/d Desember 2024					
No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	ALAT BESAR				
	excavator lainnya	8			8
	Dump Truck		1		1
	Asphalt Mixing Plant	1			1
	Asphalt Finisher	1			1
	Tandom Roller	6			6
	Stamper	5			5
	Track Loader + Attachment		1		1
	wheel Loader + Attachment	2			2
	loader lainnya	1			1
	Truck Crane		1		1
	mesin proses lainnya	17			17
	Electric generating set lainnya	11			11
	Portable Water Pump	6			6
	Pompa Air	1			1
	Pompa lainnya	19			19
	Mesin Pemotong Aspal(Draging)	2			2
	JUMLAH	80	3	0	83
	KOMPUTER				
	Internet	1			1
	Komputer Jaringan lainnya	1			1
	P.C Unit	17		3	20
	Lap Top	68	1	8	77
	Personal Komputer lainnya	4			4
	Plotter (Peralatan Mainframe)	1			1
	Hard Disk	6			6
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			1
	Monitor	1			1
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	4	7	82
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4			4
	Peralatan Personal Komputer lainnya	2			2
	Peralatan Jaringan lainnya	6			6
	JUMLAH	183	5	18	206

ALAT KESELAMATAN KERJA				
Genset	4			4
JUMLAH	4	0	0	4
PERALATAN OLAH RAGA				
Peralatan Permainan lainnya	1	1	0	2
JUMLAH	1	1	0	2
ALAT ANGKUTAN				
Station Wagon	3	5		8
Pick Up	1	6		7
kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	3			3
Sepeda Motor	46	54		100
alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	5			5
Gerobak Dorong	12			12
JUMLAH	70	65	0	135
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
Mesin Bor	4			4
perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	0	1		1
Peralatan Las Karbit	0	1		1
Gergaji	0	5		5
perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	0	1		1
Rol Meter	5			5
Global Positioning System	3			3
Grating Generator Unit	2	1		3
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3			3
JUMLAH	14	9	0	26
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4			4
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	7			7
Lemari Besi/Metal	21	6		27
Lemari Kayu	25	13		38
Rak Besi	25	1		26
Rak Kayu	6	5		11
Filing Cabinet Besi	32	13		45
Filing Cabinet Kayu	2			2
Brandkas	1	1		2
Lemari Kaca	1	1		0
CCTV - Camera Control Television System	3			3
White Board	1			1
Copy Board/Elektric White Board	1			1
Overhead Projector	0	1		1
White Board Electronic	1			1

LCD Projector/Infocus	15			15
Proyector Spider Bracket	2			2
Papan Nama Instansi	6			6
Alat Kantor Lainnya	2	1		3
Meja Kerja Kayu	4			4
Kursi Kayu	25	6		31
Sice	12	1		13
Meja Rapat	47	11		58
Tempat Tidur Kayu	1			1
Meja Resepsionis	2			2
Meja Tambahan	1			1
Meja 1/2 Biro	120	35		155
Kursi Rapat	220			220
Kursi Tamu	7	9		16
Kursi Putar	15	18	2	35
Kursi Biasa	34	1		35
Bangku Tunggu	148			148
Kursi Lipat	5	3	1	9
Meja Komputer	9	6		15
Sofa	7			7
Meubeleur lainnya	1			1
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
Mesin Pemotong Rumput	14			14
A.C. Window	47	1	2	50
Kipas Angin	4		1	5
Kompore Gas (Alat Dapur)	1			1
Alat Dapur lainnya	1			1
Televisi	16	5		11
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	1		1
Amplifier	2			2
Equalizer	1			1
Loudspeaker	16	1		17
Sound System	3			3
Microphone	4	1		3
Unit Power Supply	0	1	1	2
Camera Video	22			22
Camera film	1			1
Tangga Aluminium	3	1		2
Dispenser	2		1	3
Mimbar/Podium	1			1
Handy Cam	3			3
Lampu	9			9
Bracket Standing Peralatan	2			2
Alat Rumah Tangga Lain-lain	78	8		86
Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2			2
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2

Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4			4
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0		1	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1			1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5			5
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6			6
Kursi Kerja Pejabat lainnya	2			2
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5			5
Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	6			6
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13			13
Jumlah	931	160	11	1102
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
Audio Mixing Stationer	2			2
Microphone/Wireless MIC	11			11
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1			1
Power Amplifier	5			5
Audio Tape Reel Recorder	0	1	0	1
Digital Audio Taperecorder	0	2		2
peralatan studio audio lainnya (dst)	1			1
Camera Electronic	10			10
Tripod Camera	2			2
Camera Digital	1			1
Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3			3
Pesawat Telephone	3			3
Handy Talky (HT)	4			4
Jumlah	46	3	0	43
ALAT LABORATORIUM				0
Water Level Meter	0	1		1
Concrette Hammer Set	1			1
Pompa Hidrolik	1			1
Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2			2
Tripod	7			7
Stabilizer	1			1
Video Printer	1			1
Work Bench (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1	1		0
Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	1		5
Pressure Vessel (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1	0		1
Meja Kerja	0	2		2
Layar	2			2
Peralatan umum lainnya	5			5
JUMLAH	26	4	0	30
JUMLAH TOTAL	1.272	247	29	1551

Sumber Data: DPU PR Ta.2024

5. Anggaran Keuangan

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.127.561.466.000, dengan rincian Belanja Operasi Rp.44.041.822.000 dan Belanja Modal Rp.63.519.644.000 Selanjutnya setelah perubahan APBD 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 142.200.910.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.45.233.608.000 dan Belanja Modal Rp.96.967.302.000-Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 10 berikut

Tabel 1.5
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2024	Anggaran Perubahan 2024
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.237.329.000,-	21.610.820.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.173.000,-	163.923.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.911.000	64.911.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.98.262.000	Rp.99.012.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.535.777.000,-	19.867.293.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.535.777.000	19.370.156.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	496.887.000	497.137.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	151.622.000,-	157.872.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	151.622.000,-	157.872.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.615.000,-	5.615.000
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.615.000	5.615.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.282.000,-	R329.782.000

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000	40.100.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.780.000	66.780.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.409.000	22.409.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000
5	Penyediaan Bahan/Material	62.671.000	62.671.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.322.000	52.822.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.721.000,-	99.721.000
1	Pengadaan Mebel	20.000.000	20.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.721.000	79.721.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 353.916.000,-	393.391.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.583.000	224.583.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.333.000	166.808.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.223.000,-	598.223.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.891.000	388.891.000
2	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.544.000	59.544.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.788.000	129.788.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.584.805.000	9.249.947.000

1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.376.000	211.876.000
2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	97.441.000	97.441.000
3	Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	60.855.000	61.355.000
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	53.080.000	53.080.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.373.429.000	7.374.419.000
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	180.000.000	180.000.000
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.739.491.000	5.739.491.000
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	900.000.000	900.000.000
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	337.527.000	338.527.000
5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	216.411.000	216.411.000
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.663.142.000	1.663.642.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.142.000	1.663.642.000
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan	1.464.161.000	1.464.661.000
3	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan Tekhnis Sistem Draenase Lingkungan	198.981.000	198.981,000
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.10.966.524.000,-	10.967.274.000

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.966.524.000,-	10.967.274.000
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	10.571.581.000	10.571.581.000
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.000.000	100.000.000
3	Pembinaan dan pemeberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system air minum (SPAM)	94.943.000	95.693.000
4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	200.000.000	200.000.000
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.304.545.000	13.856.340.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12.304.545.000	13.856.340.000
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	118.034.000	118.284.000
2	Pembangunan, pemanfaatan , pelestarian dan pembongkoran,Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.618.250.000	13.069.545.000
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	24.750.000	24.750.000
4	Penyusunan kebijakan terkait penyelenggraaan bangunan gedung	18.000.000	18.000.000
5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	38.625.000	38.625.000
6	Pemeliharaan,Perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis Bangunan Daerah Kabupaten/Kota	486.886.000	587.136.000
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 2.722.878.000,-	2.802,878.000

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.722.878.000,-	2.802,878.000
1	Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	2.415.324.000	2.295.324.000
2	Penyusunan Rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah kabupaten/kota	307.554.000	507.554.000
G	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp. 101.114.000,-	101.114.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.50.360.000,-	50.360.000
1	Pembinaan dan peningkatan kelembagaan jasa konstruksi	24.020.000	24.020.000
2	Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator atau analis	26.340.000	26.340.000
	Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	50.754.000,-	50.754.000
1	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten / kota	50.754.000	50.754.000
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70.546.314.000,-	83.141.972.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	70.546.314.000	83.141.972.000
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000	800.000.000
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	35.000.000.000	46.886.411.000
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	596.314.000	597.564.000
4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	20.000.000.000	20.002.247.000
5	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000	200.000.000
6	Pemeliharaan Berkala Jembatan	200.000.000	400.000.000
7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000	600.000.000

8	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.250.000.000	13.455.750.000
9	Pelebaran jembatan	200.000.000	200.000.000
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	397.815.000	433.565.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	211.280.00	246.780.000
1	Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/kota	211.280.00	246.780.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	58.357.000	58.357.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	45.497.000	45.497.000
2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	12.860.000	12.860.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.678.000	96.928.000
1	Pelaksanaan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	47.380.000	47.630.000
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	49.298.000	49.298.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	31.500.000	31.500.000
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	31.500.000	31.500.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.000.000	37.000.000
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	37.000.000
2	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	37.000.000
	TOTAL	127.561.466.000	142.200.910.000

Sumber: DPA Murni dan DPA Perubahan DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2024

1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama yang dihadapi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-20226 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Jalan dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.
2. Strategi Peningkatan Pembangunan Drainase dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase.
3. Strategi Peningkatan Akses Air Minum dilaksanakan dengan Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM.
4. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Air Baku melalui kebijakan Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Strategi Meningkatkan Pengelolaan Konservasi SDA melalui Peningkatan Pengelolaan Konservasi SDA.
6. Strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan Daerah dan Kualitas Administrasi Perkantoran serta Kapasitas Keuangan Daerah melalui kebijakan Peningkatan Sumber Daya Pegawai dengan mengirimkan peserta diklat, seminar dan lokakarya dan Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. *Permasalahan yang dihadapi antara lain:*

- a. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, hal ini dapat dilihat dari Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024, total panjang Jalan Kabupaten adalah 1.017,150 Km, Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan 4 yang menyebabkan turunya kondisi jalan yang tadinya baik menjadi sedang, sedang menjadi rusak ringan dan

rusak ringan menjadi rusak berat yang di sebabkan oleh kondisi struktur tanah yang labil, curah hujan yang tinggi, bencana alam dan tingkat penggunaan jalan yang Over Load Over Dimension (ODOL).

- b. Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- d. Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Karanggayam, Sruweng, Karangsambung, Sadang, Padureso, Alian Poncowarno dan Kemangguan
- e. Masih ditemukan genangan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.
- f. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan serta adanya kejadian bencana yg menyebabkan kerusakan jaringan irigasi
- g. Masih kurang penanganan kerusakan sungai, muara, dan pantai akibat banjir dan abrasi gelombang air laut.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044.(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 113).

Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, gambaran umum organisasi, struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, serta Landassan Hukum dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Strategis (RENSTRA) yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Indikator Sasaran Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditentukan, analisis dan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Realisasi Anggaran.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja, termasuk tinjauan umum capaian kinerja, permasalahan/ kendala, serta strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memberikan pelayanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan air bersih, drainase, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan embung. Pelaksanaan pelayanan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut. Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan, yaitu :

- a. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD, namun tidak berhubungan langsung dengan sasaran dan tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.

- b. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- c. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Wajib Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan mejadi pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA,
MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

3. Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Akronim dari Visi Bupati Kebumen adalah :

“KEBUMEN SEMARAK”

"Kebumen Sejahtera, Mandiri, Barakhlak Bersama Rakyat"

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Dalam perumusan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) dan Misi IV RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsive serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021- 2026

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84	85	85,5	86
2	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69

Sumber : RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, sesuai dengan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

mendukung pada misi keempat yaitu “Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran selama periode Renstra.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	1. Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi 2. Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 3. Pelayanan publik yang prima
MISI IV : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	1. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain	1. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2. pembangunan sistem jaringan prasarana

	ekonomi daerah	yang mendukung pertumbuhan ekonomi	<p>jalan di antaranya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan) d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangasambung-Karangbolong e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri <p>3. Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo <p>4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari
--	----------------	------------------------------------	--

Sumber RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026 (diolah)

Untuk mencapai misi tersebut di atas maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran kebijakan, dalam 5 (lima) tahun mendatang, meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap pencernaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor public seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah

Sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen. indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69

B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)								
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89	

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%)
		Cap. 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
1.	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80	80	77,8	80	82,5	85	87,5	87,5
2.	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	17,54	18,75	20	21,25	22,5	23,75	25	25
3.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
4.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
5.	Prosentase pekerjaan yang tersusun DEDnya	%	%	19	21	23	25	27	27
6.	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
7.	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60	64,92	64,92

8	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	75	75	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55
---	--	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026

3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran strategi organisasi yaitu melalui program dan kegiatan. Dalam mendukung pencapaian Target Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tahun 2024, DPUPR melaksanakan 2 Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 9 (Sembilan) Program, 21 (dua puluh Satu) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Sub Kegiatan, Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

A.Sekretariat

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Penyediaan Bahan/Material
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Bidang Pelaksana Tekhnis Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2024 telah menyusun Dokumen perencanaan teknis bidang bina marga sejumlah 13 paket dokumen tentang penyelenggaraan jalan dan jembatan
 - b) Pemeliharaan Berkala Jalan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Bonosari - Kedungwringin (Desa Bonosari), Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjungsari - Nampudadi (RT.03 RW.02 Desa Nampudadi),

Pemeliharaan Berkala Jalan Walikonang IB Kelurahan Bumirejo, Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan –mirit petikusan, Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Giritirto – Plipitan, Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Gombang – Kuwarasan, Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Jatinegara – Purbowangi, Pemeliharaan Berkala Jalan Peneket – Sidoluhur, Pemeliharaan Berkala Jalan Bocor – Banjurpasar, Pemeliharaan Berkala Jalan jatinegara – Purbowangi lanjutan, Pemeliharaan Berkala Jalan Selokerto – Buayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari – Tambaharjo, Pemeliharaan Berkala Jalan Kalibeji – Sempor lanjutan, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal – Kaligending, Pemeliharaan Berkala Jalan Korowealang – Mulyosri, Pemeliharaan Berkala Jalan Kejayan Pemeliharaan Berkala Jalan sempor lama Pemeliharaan Berkala Jalan Karangduwur – Karanggadung dan sebagainya.

- c) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
- d) Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Pelebaran Jalan Ruas Adiluhur -Kalipurwo No Ruas 149 Kab Kebumen (BANPROV), Pelebaran Jalan Sruni - Krakal No Ruas 6 Kab Kebumen (BRANPOV) Rekonstruksi Jalan Donorejo -Kedungwringin No Ruas 200 Kab kebumen, Rekonstruksi Jalan Kebekelan - Lembupurwo No Ruas 20 Kab kebumen (BANPROV)
- e) Pemeliharaan Rutin Jembatan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan kabupaten
- f) Pemeliharaan berkala Jembatan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemeliharaan berkala jembatan pada ruas jalan peneket – sidoluhur, pemeliharaan berkala jembatan pada ruas sidayu – lawangawu, dan pengawasan pemeliharaan berkala jembatan pada ruas jalan sidayu – lawangawu.
- g) Survey kondisi Jalan/Jembatan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan

- h) Pemeliharaan Rutin Jalan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan jembatan kabupaten di 4 (empat) UPT dan penanganan lainnya
 - i) Pelebaran jembatan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Pelebaran Jembatan pada ruas Jalan Sruweng – Kritig.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Pembangunan SPAM sebanyak 33 Paket dari dana DAK diantaranya Pembangunan SPAM Desa Adikarso Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Ampih Kecamatan Buluspsantren (DAK), Pembangunan SPAM Desa Bagong Kecamatan Prembun (DAK), Pembangunan SPAM Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo (DAK), Pembangunan SPAM Desa Geblug Kecamatan Buayan (DAK), Pembangunan SPAM Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jerukagung Kecamatan Klirong (DAK), Pembangunan SPAM Desa Purwodadi Kecamatan Sruweng (DAK) Pembangunan SPAM Desa Purwodeso Kecamatan Kuwarasan (DAK) Pembangunan SPAM Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo (DAK) Pembangunan SPAM Desa Tamanwinangun Kecamatan Kebumen (DAK) dan sebagainya.
 - b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Peningkatan SPAM di Desa Sruweng kecamatan Sruweng (HAMBK)
 - c) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Kedungwringin Kecamatan sempor (Pokir) dan juga Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM 3 Paket.
 - 3. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

- Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (jumlah penertiban dokumen sebanyak 343 dokumen PBG dan SLF)
- b. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkoran, Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pendopo Kabumian.
 - c. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan terkait Bangunan Gedung
 - e. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Tahun 2024 sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali sosialisasi dengan total peserta 300 (tiga ratus) orang.
 - f. Pemeliharaan dan Perawatan dan pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. sebanyak 4 (empat) paket pemeliharaan dan perawatan gedung
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- a. Penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis daerah kabupaten/kota. ada 9 (Sembilan) paket perencanaan.
 - b. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melaksanakan penerimaan hibah P.C.Semen sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) lokasi ke Perdesaan
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa Konstruksi
 - b. Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis.
 - c. Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 - 2) System Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /kota.
 - Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
7. Program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan
 - 4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - 5) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Pemeliharaan Pemeliharaan Drainase di RT 01 dan RW 01 desa Pucangan kecamatan Ambal , pemeliharaan saluran Draenase Dukuh Karuan RT.002/RW 002 Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinagun dan pemeliharaan saluran Draenase di 8 (delapan) wilayah UPTD : UPTD PJI Bedegolan, UPTD : UPTD PJI Kaligending UPTD : UPTD PJI Kedungsamak

- 2) Penyusunan Rencana kebijakan Strategi dan Tekhnis Sistem draenase

2.1 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan sasaran program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks	88,65 Indeks				
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10 Indeks	63,10 Indeks				63,10

	Sasaran :						
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48 Indeks	61,48 Indeks			61,48

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 didukung dengan Anggaran murni sebesar Rp. 127.561.466.000,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.44.041.822.000,- dan Belanja Modal Rp.63.519.644.000, Selanjutnya setelah perubahan APBD 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 142.200.910.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.45.233.608.000,- dan Belanja Modal Rp.96.967.302.000,-.

Tabel 2.7
Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.21.237.329.000,-	Rp.21.610.820.000,-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.7.584.805.000,-	Rp.7.586.305.000,-
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.10.966.524.000,-	Rp.10.967.274.000,-
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.1.663.142.000,-	Rp.1.663.642.000,-
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.12.304.545.000,-	Rp.13.856.340.000,-
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.2.722.878.000,-	Rp.2.802.878.000,-
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.70.546.314.000,-	Rp.83.141.972.000,-
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.101.114.000,-	Rp.101.114.000,-

9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.397.815.000,-	Rp.433.565.000,-
10.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 37.000.000,-	Rp.37.000.000,-
	TOTAL	127.561.466.000,-	142.200.910.000,-

Sumber: DPA Murni dan Perubahan DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2024

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, serta akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023. Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut: Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase (%) capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja DPUPR Ta.2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah,

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Program dan Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi dan Misi Ke IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang kemudian Tujuan ini dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan
- b. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

a) Realisasi Capaian DPUPR

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan perjanjian kinerja tahun keempat periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.2
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rea	Tingkat Capaian	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	100%	100%	Sangat Baik
Tujuan : Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah						
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10	Realisasi dicukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96	Sangat Baik

Sumber: DPA DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Dari table di atas, dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan) adalah dengan predikat sangat baik (100%), Sedangkan pada sasaran ke 2 (Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah) dengan predikat sangat baik (100%), dan pada sasaran strategis (Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah) dengan predikat sangat baik (95,96). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara rata-rata adalah sangat baik (100%). Melihat 2 sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tercapai 100%, maka hal ini

menunjukkan efektivitas dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Adapun faktor yang mendorong tercapainya target dan efisien sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. SDM yang Memadai dan adanya Komitmen Pemerintah Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan insfrastruktur jalan dan irigasi
3. Perbaikan kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
4. Dukungan seluruh masyarakat kabupaten kebumen
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten kebumen
6. Perencanaan yang tepat dalam hal penganggaran, jadwal dan pelaksanaan serta hasil evaluasi tahun lalu.

b) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan di dukung melalui 9 (sembilan) program unggulan yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	87,20	87,20	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	82,5	78,75	95,45	Adanya refocusing anggaran. Adanya kejadian bencana yg menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi tidak baik. Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase pelayanan Air Bersih perpipaan	%	22,5	24,76	110,42	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,	Prosentase Saluran Draenase dalam kondisi baik	%	18,01	16,21	90,01	Adanya refocusing anggaran yg mengakibatkan tidak adanya pembangunan draenase.jumlah panjang drainase 1089,42 km yg blm terbangun 722,58 km. Adanya kejadian bencana sehingga menyebab kan beberapa titik jaringan drainase mengalami longsor dan kebocoran drainase. Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penataan Bangunan Gedung,	Prosentase Bangunan Pemerintah dalam kondisi baik	%	82,15	82,49	100,42	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,	Prosentase Pekerjaan bangunan yg tertangani	%	15	15	100	
7	Program Penyelenggaraan Jalan,	Prosentasee Jalan Kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap	%	79,48	73,48	92,45	Adanya perubahan kondisi jalan yang disebabkan oleh kondisi alam, umur rencana jalan. Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan 4 yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (Over Dimension/Overloading) Adanya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada Renstra
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi,	Prosentase Penyedia Jasa Kontruksi yang telah dibina dan Nilainya Baik	%	55,08	55,08	100	
9	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase kesesuaian lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,35	91,35	100	
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	Persentase Penanganan sengketa Lahan	%	100	100	100	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini ditandai dengan capaian kinerja program mencapai 100%. Hasil capaian kinerja program ini menjadi pendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan dan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.

c) Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Capaian kinerja terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dan 2024 secara umum mencapai 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terdapat 2 (dua) indikator berupa indeks kepuasan masyarakat, indeks kualitas Infrastruktur Daerah dan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum. Untuk selanjutnya realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan realisasi kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada berikut

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 s/d 2024

Tahun 2022				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100%	100%	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks kualitas Infrastruktur Daerah	53,81	56,07	104,39 Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9

Tahun 2023				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100%	100%	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	59,27	57,93	97,74 Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16	58,94	99,63

Tahun 2024				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100%	100%	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks kualitas Infrastruktur Daerah	63,10	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB	
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96

Tabel 3.5
Capaian Kemajuan sasaran strategis DPUPR Dari Ta.2022 s/d 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisa 2022	Realisa 2023	Realisa 2024	Tingkat kemajuan
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100	
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	56,07	57,93	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB	
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,89	58,94	59,00	

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Tabel 3.4 dan 3.5 Kinerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Secara umum meningkat , akan tetapi untuk pencapaian target indikator indeks infrastruktur Pekerjaan Umum dari Target Tahun 2024 yaitu 61,48 dengan Realisasi 59,00 atau sama dengan capaian Kinerja 95,96%. Hal ini didukung oleh pencapaian kinerja Penyelenggaraan Jalan, Sumber Daya Air, dan Pelayanan Air Bersih Perpipaan.

1. Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi

Sesuai dengan Sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang yaitu meningkatnya indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Pekerjaan umum dengan menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu:

(Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan + Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap/3)

Tabel 3.6
Realisasi dan capaian kinerja Ta.2023
Dan Realisasi dan capaian kinerja Ta.2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Real 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16	58,94	97,93 %	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Real 2024	Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

Gambar 3.1
Realisasi kinerja Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah
Tahun 2021 s/d Tahun 2024



Gambar DPUPR

Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas untuk Realisasi Capaian Kinerja DPUPR serta untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 masuk dalam kategori baik karena mengalami Peningkatan ditahun sebelumnya, sedangkan untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah, didukung oleh 3 (tiga) Indikator Program, sebagai berikut :

1. Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah 1017,150 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 102,966 Km atau sebesar 10,12 % yang lokasinya tersebar di 22 wilayah yaitu kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Adimulyo, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, Alian, Pejagoan, Petanahan, Sruweng, Klirong, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Mirit, Bonorowo dan Kebumen. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Kondisi awal	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan (km)
		2022	2023	2024
1	Kondisi Baik	292,179	450,569	411,814
2	Kondisi Sedang	416,841	271,269	335,543
3	Kondisi Rusak Ringan	162,026	157,790	166,827
4	Kondisi Rusak Berat	89,312	137,522	102,966
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358	1017,150
Proporsi Kondisi Baik (%)		30,424	44,30	40,49
Proporsi Kondisi Sedang (%)		43,405	26,67	32,99
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		16,871	15,51	16,40
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		9,30	13,52	10,12

Sumber: Data Jalan DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Pada tahun 2024 sesuai SK Jalan total panjang jalan kabupaten adalah dari tahun sebelumnya 960,358 Km menjadi 1.017,150, adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 adalah sepanjang 747.357 kilometer atau sebesar 73,48 %. Dimana Kondisi ini mengalami peningkatan status jalan dari kondisi sedang ke kondisi baik, yaitu sebesar 7.50 %, atau 76,271 km. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dimana jalan kondisi mantap pada tahun 2023 sebesar 70,97 % atau sepanjang 721,838 kilometer namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sepanjang 25,519 Kilometer atau mencapai 2,51 %.

Sedangkan dalam target RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen pada tahun 2024 sebesar 79,48 % dengan realisasi 73,48%. belum tercapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,89 % atau sepanjang 9,037 km. disebabkan karena Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan IV yang disebabkan oleh bencana alam dan adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension / Overloading*), serta adanya penambahan panjang ruas jalan dari 960,358 km menjadi 1017,15 km. dan Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra.

(Perhitungan realisasi menggunakan Prosentase Perbandingan (jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / jumlah panjang jalan kabupaten x 100%).

Tabel 3.8
Capaian Jalan Kabupaten Kebumen Dalam Kondisi Mantap
Tahun 2023 Tahun 2024

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Sat	Kondisi awal Th.2021	Tahun 2023			Akhir RPJMD 2021
				Tar	Real	Cap	
1	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	78,27	76,23	70,97	93,10	82,00

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Sat	Kondisi awal Th.2021	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2021
				Tar	Real	Cap	
1	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	78,27	79,48	73,48	92,45	82,00

Sumber DPUPR Tahun 2024

Tabel 3.9
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi di Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2021-2026	REAL KINERJA TAHUN 2021 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2022 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2023 (km)	REAL. KINERJA TAHUN 2024 (km)	REAL. KINERJA TAHUN 2025 (km)	REAL. KINERJA TAHUN 2026 (km)
KONDISI JALAN							
a. BAIK	-	584,109	292,179	450,569	411,814	-	-
b. SEDANG	-	167,516	416,841	271,269	335,543	-	-
c. RUSAK RINGAN	-	115,411	162,026	157,790	166,827	-	-
d. RUSAK BERAT	-	93,322	89,312	137,522	102,966	-	-

Sumber DPUPR Tahun 2024



Gambar 3.2

JALAN KONDISI MANTAP



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan melalui beberapa Sub. Kegiatan yaitu : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Pelebaran Jembatan. Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut. sebesar Rp.83.141.972.000 adapun realisasinya sebesar Rp.81..326.977.366 (97,82%).

2. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pada tahun 2024 Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air bersih sebesar 476.112 kk Sedangkan jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan pelayanan sebesar 476.112 kk, adapun Capaian indikator sasarannya sebesar 100 %. Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM mencakup keseluruhan dengan 3 (tiga) sumber perolehan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu melalui PDAM, SPAM Pedesaan dan Sumber air lain (Sumur, langsung dari mata air). namun angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum.

Rumus Perhitungan Realisasi Menggunakan Persentase Perbandingan (Jumlah RT terlayani air bersih / jumlah rumah tangga) x 100.

Tabel 3.10
Capaian pelayanan air bersih
sesuai dengan Target SPM

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2023							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)x100%	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDES AAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	461.823	35.330	49.714	364.269	449.313	97.29%	100%	Ketersediaan Dana & Mata Air

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2024							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)x100%	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDES AAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.112	37.357	51.853	386.902	476.112	100%	100%	

Tabel 3.11
Realisasi Capaian pelayanan air bersih perpipaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Program	TAHUN 2023					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya		Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
		Sumbungan Rumah Ta.2023	PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2023	1.409.951	85.044	141.320	198.856	340.176	24.14%

Indikator Program	TAHUN 2024					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya		Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
		Sumbungan Rumah Ta.2024	PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2024	1.441.425	89.210	142.736	214.104	356.840	24,76

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen,

Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan pada Tahun 2024 yang melalui jalur perpipaan yang digunakan *rumah tangga sejumlah 356840 jiwa* sedangkan Total Jumlah Penduduk Seluruhnya pada tahun 2024 sebesar 1441425 jiwa atau realisasi sebesar 24,76% lebih tinggi dari target OPD yang direncanakan sebesar 22,50%. angka tersebut sudah memenuhi target yang

Tabel 3.11
Realisasi Capaian pelayanan air bersih perpipaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Program	TAHUN 2023					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	Sumbungan Rumah Ta.2023	Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
			PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2023	1.409.951	85.044	141.320	198.856	340.176	24.14%

Indikator Program	TAHUN 2024					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	Sumbungan Rumah Ta.2024	Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
			PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2024	1.441.425	89.210	142.736	214.104	356.840	24,76

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen,

Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan pada Tahun 2024 yang melalui jalur perpipaan yang digunakan *rumah tangga sejumlah 356840 jiwa sedangkan* Total Jumlah Penduduk Seluruhnya pada tahun 2024 sebesar 1441425 jiwa atau realisasi sebesar 24,76% lebih tinggi dari target OPD yang direncanakan sebesar 22,50%. angka tersebut sudah memenuhi target yang

ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2024, dimana realisasi SPM mencapai 100%.

Keberhasilan indikator ini didukung Anggaran yang Memadai, perencanaan yang baik, serta ketersediaan sumber mata air dan pengelola (Kelompok Pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan terutama bagi daerah yang krisis air bersih. Walaupun demikian pembangunan SPAM tetap perlu ditingkatkan khususnya peningkatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan karena mayoritas akses masyarakat terhadap air minum bersumber dari bukan jaringan perpipaan. Akses sumber air minum bersumber jaringan perpipaan lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Adapun Kegiatannya Meliputi : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system air minum (SPAM) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik dari APBD/DAK serta didukung oleh 1 (satu) Program dan 4 (Empat) kegiatan. Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran capaian jalan dalam kondisi mantap yang bersumber dari APBD dan DAK sebesar Rp.10.967.274.000 adapun realisasinya sebesar Rp.10.601.090.314 adapun Realisasinya sebesar 96,66 %

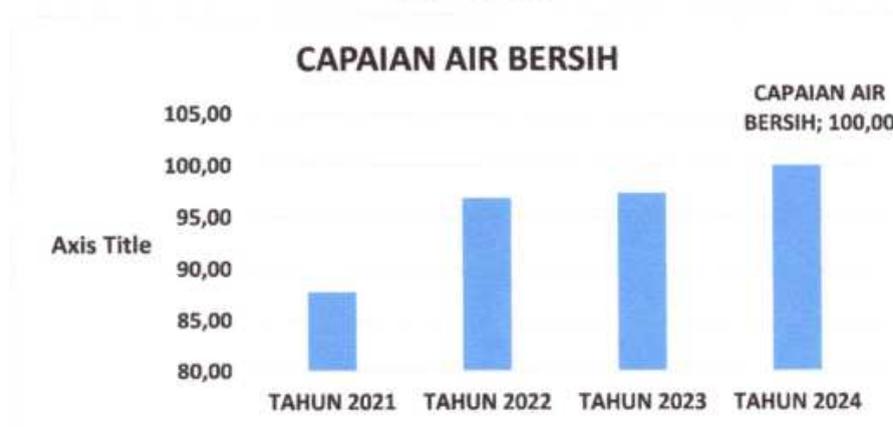
Tabel.3.12
 Capaian Sasaran Strategis
 Cakupan Pelayanan Air Bersih

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satu an	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2023			Target Akhir RPJM 2021
				Target	Real	Cap	
1	Cakupan pelayanan air bersih	%	18,75	21,25	24,14	113,6	25,00

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satu an	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2024			Target Akhir RPJM 2021
				Target	Real	Cap	
1	Cakupan pelayanan air bersih	%	18,75	22,50	24,76	110,0 4	25,00

DPUPR Ta.2024

Gambar 3.3



3. Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2024 total luasan jaringan irigasi adalah 12.260,00 Ha, kondisi baik sebesar 10.114,50 Ha (78,75%), kondisi sedang 172,02 Ha (1,40%), kondisi rusak ringan 143,35 Ha (1,17%), dan kondisi rusak berat 2.289,27 Ha (18,67%). Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dimana capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik Sebesar 9.650,36 ha (78,71%) naik sebesar 75,00 ha atau (4,08%), Meskipun begitu target pada tahun 2024 belum sesuai target dari 82,5% dan realisasi baru mencapai 78,75% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor dan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra. masih ada banyaknya saluran irigasi dan bendungan yang masih mengalami kerusakan sebesar 2.145,50 ha atau 17,50% yang masih membutuhkan perbaikan dan perawatan kedepan. *Rumus perhitungan realisasi menggunakan perbandingan (jumlah luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik / total luasan jaringan irigasi x 100%)*

Tabel 3.13
Capaian Jaringan Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik

No	IKU OPD, Program/ Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th 2021	TAHUN 2023			Target. Akhir RPJMD 2021
				Tar	Real	Cap	
1	Capaian jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,17	80,00	78,71	98,39	87,5
				TAHUN 2024			
				Tar	Real	Cap	
				82,50	78,75	95,45	87,5

Gambar 3.4



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Sub.kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa. Adapun Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut baik yang bersumber dari APBD/DAK sebesar Rp. 7.374.419.000 realisasinya sebesar Rp. 7.73.243.637 atau (95,92 %)

Berdasarkan data Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sudah tercapai sesuai yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026,akan tetapi dalam proses pencapaian terdapat beberapa permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ditempuh diantaranya sebagai berikut :

a. Permasalahan

- a) Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
- b) Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
- c) Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
- d) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
- e) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau
- f) Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
- g) Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Upaya mengatasi Permasalahan

1. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
3. Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar Desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
4. Mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase secara optimal serta berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3 Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.142.200.910.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 137.947.482.361,00 (97,01%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp.4.253.427.639,00 (2,99%)

Tabel 3.14
Realisasi Keuangan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten kebumen

Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran			
	Pagu	Realisasi	cap	Deviasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.610.820.000	20.343.316.013	94,13	5,87
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.923.000	161.425.331	98,48	1,52
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.911.000	63,901.731	98,45	1,55
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.012.000	97.523.600	98,50	1.50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.867.293.00	18.627.346.111	93,76	6,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.370.156.000	18.135.877.218	93,63	6,37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	497.137.000	491.468.893	98,86	1,14
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	157.872.000	152.492.938	99,75	0,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.615.000	-	0,00	0,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.782.000	324.988.805	98,55	1,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000	40.002.700	99,76	0,24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.780.000	66.767.000	99,98	0,02
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.409.000	22.263.900	99,35	0,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.996.000	99,96	0,04
Penyediaan Bahan/Material	62.671.000	62.565.100	99,83	0,17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	70.575.005	94,10	0,90
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.822.000	52.818.700	99,99	0,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.721.000	98.344.400	98,62	1,38
Pengadaan Mebel	20.000.000	20.000.000	100	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.721.000	78.344.400	98,27	1,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.391.000	388.421.233	98,74	1,26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.909.500	95,48	4,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.583.000	219.750.233	97,85	2,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.808.000	166.761.500	99,97	0,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.223.000	590.297.195	98,68	1,32

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.891.000	382.822.253	98,44	1,56
Pemeliharaan Mebel	20.000.000	19.920.000	99,60	0,40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.544.000	59.466.042	99,87	0,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.788.000	128.089.900	98,69	1,31
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.249.947.000	8.936.758.257	96,00	4,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.876.000	209.647.287	98,95	1,05
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	97.441.000	96.751.287	99,29	0,71
Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	61.355.000	61.224.500	99,79	0,21
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	53.080.000	51.671.500	97,35	2,65
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.374.419.000	7.73.243.637	95,92	4,08
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	180.000.000	177.684.801	98,71	1,29
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.739.491.000	5.458.861.663	95,11	4,89

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	900.000.000	886.027.273	98,45	1,55
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	338.527.000	337.463.000	99,69	0,31
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	216.411.000	213.206.900	98,52	1,48
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.663.642.000	1.653.867.333	99,41	0,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.642.000	1.653.867.333	99,41	0,59
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan	1.464.661.000	1.458.294.833	99,57	0,43
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan Tekhnis Sistem Draenase Lingkungan	198.981,000	195.572.500	98,29	1,71
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.967.274.000	10.601.090.314	96,66	3,34
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.967.274.000	10.601.090.314	96,66	3,34
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	10.571.581.000	10.233.004.848	96,80	3,20
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100.000.000	97.596.000	97,60	2,40
Pembinaan dan pemeberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan system air minum (SPAM)	95.693.000	76.208.000	79,64	20,36

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	200.000.000	194.281.466	97,14	2,86
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.856.340.000	13.562.355.313	97,88	2,12
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.856.340.000	13.562.355.313	97,88	2,12
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	118.284.000	114.036.800	96,41	3,59
Pembangunan, pemanfaatan , pelestarian dan pembongkoran, Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.069.545.000	12.789.947.115	97,86	2,14
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	24.750.000	24.517.500	99,06	0,94
Penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung	18.000.000	16.771.178	93,17	6,83
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung	38.625.000	36.179.066	93,67	6,33
Pemeliharaan, Perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis Bangunan Daerah Kabupaten/Kota	587.136.000	580.903.654	98,94	1,06

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.802,878.000	2.615.062.979	93,30	6,70
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.802,878.000	2.615.062.979	93,30	6,70
Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	2.295.324.000	2.126.465.091	92,64	7,36
Penyusunan Rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah kabupaten/kota	507.554.000	488.597.888	96,27	3,73
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.114.000	95.532.360	94,48	5,52
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.360.000	47.416.750	94,16	5,84
Pembinaan dan peningkatan kelembagaan jasa konstruksi	24.020.000	22.262.200	92,68	7,32
Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator atau analis	26.340.000	25.154.550	95,50	4,50
Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	50.754.000	48.115.610	94,80	5,20
Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten / kota	50.754.000	48.115.610	94,80	5,20
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83.141.972.000	81.326.977.366	97,82	2,18
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	83.141.972.000	81.326.977.366	97,82	2,18
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	800.000.000	791.270.200	98,91	1,09

Pemeliharaan Berkala Jalan	46.886.411.000	45.937.811.000	97,98	2,02
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	597.564.000	590.060.975	98,74	1,26
Pelebaran Jalan Menuju Standar	20.002.247.000	19.480.952.000	97,39	2,61
Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000	195.777.500	97,89	2,11
Pemeliharaan Berkala Jembatan	400.000.000	392.035.500	98,01	1,99
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000	547.927.000	91,32	8,68
Pemeliharaan Rutin Jalan	13.455.750.000	13.195.301.991	98,06	1,94
Pelebaran jembatan	200.000.000	195.841.200	97,92	2,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	433.565.000	429.589.114	99,08	0,92
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	246.780.000	243.680.104	98,74	1.26
Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/kota	246.780.000	243.680.104	98,74	1.26
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	58.357.000	58.238.442	99,80	0,20
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	45.497.000	45.407.442	99,80	0,20
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	12.860.000	12.831.000	99,77	0,23
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.928.000	96.369.442	99,42	0,58

Pelaksanaan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	47.630.000	47.301.600	99,31	0,69
Sistem Informasi Penataan Ruang	49.298.000	49.067.848	99,53	0,47
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	31.500.000	31.301.120	99,37	0,63
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	31.500.000	31.301.120	99,37	063
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.000.000	36.800.645	99,46	0,54
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	36.800.645	99,46	0,54
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	36.800.645	99,46	0,54
TOTAL	142.200.910.000	137.947.482.361	97,01	2,99

Sumber Laporan Simpel 2024

BAB IV PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan masuk dalam kriteria sangat baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Target Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tercapai 59,00%, meliputi Indikator Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dengan target sebesar 82,50% dapat terealisasi sebesar 78,75% dengan nilai capaian 95,45%. Kemudian indikator Persentase Pelayanan Air Bersih dengan target sebesar 22,5% dapat terealisasi sebesar 24,76 % atau dengan nilai capaian 110%. dan indikator Prosentase Jalan Kewenangan Kabupaten

Dalam Kondisi mantap dengan target 79,48%, dapat terealisasi sebesar 73,48% dengan nilai capaian 92,45%.

- b) Secara Umum Capaian kinerja program DPUPR Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 dikategorikan baik adapun rata-rata tercapai sebesar 98,69%. dimana terdapat beberapa program di DPUPR yang capaiannya kurang dari 100% yaitu untuk Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan system Drainase serta Program Untuk Penyelenggaraan Jalan
- c) Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 97,01%. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2024 telah disediakan dana sebesar Rp. 142.200.910.000 dan realisasi sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 137.947.482.361

B. Permasalahan dan Kendala

Meskipun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen dengan sasaran dan program Tahun 2024 dapat terpenuhi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis yang perlu di antisipasi di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut meliputi :

- 1) Masih perlunya peningkatan infrastruktur karena masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
- 2) Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
- 3) Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak

- berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
- 4) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
 - 5) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau.

C. Rekomendasi

Beberapa strategi guna peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan di Tahun 2025, antara lain:

1. Perlu Dukungan Anggaran Pendamping baik dari Pusat, Banprov serta APBD, Kabupaten dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sehingga kegiatan-kegiatan yang kinerjanya belum dapat mencapai target dapat selesai sesuai yang sudah direncanakan/dijadwalkan.
2. Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran kas yang ada, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Perlu pencermatan Kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi Kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
4. Perbaiki kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
5. Perlu adanya dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen
6. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis DPUPR Kabupaten Kebumen sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
7. Perlu pencermatan Kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi Kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara mengirimkan menjadi peserta diklat teknis dan
9. Mengoptimalkan kinerja SDM yang tersedia dengan memperkuat komitmen kerja

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728/199803 1 006